

# TRANSISI MADRASAH TSANAWIYAH KE SEKOLAH MENENGAH ATAS (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MODERN MUHAMMADIYAH IMAM SYUHODO SUKOHARJO)

*Mahasri Shobahiya*

Program Studi Pendidikan Agama Islam - Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
e-mail: Mahasri.Shobahiya@ums.ac.id

## ABSTRACT

*This study aims to criticize the reasons for selecting the implementation of MTs, temporally at the level of senior high school in Muhammadiyah Modern Islamic Boarding School Imam Syuhodo Sukoharjo. That the implementation of MTs, temporally at the level of senior high school in Muhammadiyah Modern Islamic Boarding School Imam Syuhodo Sukoharjo can be seen from three dimensions, namely (1) curriculum; with a senior high school form, it is an educational institution under the guidance of Kemendikbud, curriculum development is relatively more freely and felt there is freedom, including developing a curriculum based on Muhammadiyah Islamic Boarding School; (2) Welfare; with a senior high school form, it is an educational institution under the guidance of Kemendikbud felt more prosperous, because the institution is quite easy to get donation. This was felt different when compared with the MTs under the control of Kemenag; and (3) the administration; with a senior high school form which is an educational institution under the control of Kemendikud perceived administrative affairs not as complicated as in the form of MTs under the guidance of Kemenag.*

**Keywords:** *Implementation, Madrasah, School*

التجريد-تهدف هذه الدراسة انتقادا على أسباب اختيار تنفيذ شكل وحدة تعليمية للمدرسة الثانوية بينما في المستوى التعليمي أعلاه على شكل المدرسة العالية العامة بمعهد إمام شهداء العصري المحمدية بسوكوهارجو. أن أسباب اختيار تنفيذ شكل وحدة تعليمية للمدرسة الثانوية بينما في المستوى التعليمي أعلاه على شكل المدرسة العالية العامة بمعهد إمام شهداء العصري المحمدية بسوكوهارجو يمكن النظر إليها من ثلاثة أبعاد، يعني: (1) قسم شؤون التدريس؛ بوحدة تعليمية للمدرسة العالية العامة وهي مؤسسة تعليمية تحت إشراف وزارة شؤون التربية والثقافة، تطوير المنهج الدراسي أكثر مرونة وحرية نسبيا، منها تطوير المنهج الدراسي القائم على معهد المحمدية؛ (2) شؤون الرعاية؛ بوحدة تعليمية للمدرسة العالية العامة وهي مؤسسة تعليمية تحت إشراف وزارة شؤون التربية والثقافة تشعر أكثر رعاية، لأن سهلت لها الحصول على المساعدة. وكان ذلك يمكن الشعور بها بالمقارنة مع المدرسة الثانوية تحت

إشراف وزارة الشؤون الدينية؛ و(3) شؤون الإدارة؛ بوحدة تعليمية للمدرسة العالية العامة وهي مؤسسة تعليمية تحت إشراف وزارة شؤون التربية والثقافة تشعر الشؤون الإدارية ليست معقدة وصعبة من شكل المدرسة الثانوية تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، المدرسة، المدرسة

## PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling awal, unik dan dapat bertahan sampai saat ini. Bahkan tidak sedikit Pondok Pesantren yang berdiri pada tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, namun sampai saat ini masih eksis, di antaranya adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo (1926), Pondok Pesantren Buntet Cirebon (1785), Pondok Pesantren Langitan Sidogiri Pasuruan (1718), Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi Madura (1787), Pondok Pesantren Langitan Tuban (1852), Pondok Pesantren Thawalib Padang Panjang (1914), Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (1899), Pondok Pesantren Alkahirat Palu (1929), Pondok Pesantren Rasydiah Khalidiah Kalimantan Selatan (1922), dan Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep (1887) (<http://endangermanto.com>, diakses pada 3 Januari 2017). Eksistensi Pondok-Pondok Pesantren tersebut antara lain juga didukung lembaga-lembaga pendidikan formal yang dikembangkan di dalamnya, baik dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs),

Madrasah Aliyah (MA), maupun Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); juga Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah, yaitu SD, SMP, dan SMA merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada masing-masing jenjang, sedangkan SMK merupakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah. Adapun MI, MTs, dan MA merupakan lembaga pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, sedangkan MAK merupakan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah (PP RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bab I Pasal 1).

Pada umumnya, lembaga-lembaga pendidikan dikembangkan

secara linier, baik lembaga pendidikan umum, kejuruan, maupun pendidikan umum binaan Menteri Agama. Maksud linier di sini adalah, misalnya saat sekelompok orang atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) mendirikan sebuah lembaga pendidikan dalam bentuk SD, selanjutnya akan mendirikan SMP, SMA ataupun SMK. Dan saat sekelompok orang atau Ormas mendirikan MI, maka selanjutnya akan mendirikan MTs, MA ataupun MAK. Dengan demikian, menjadi sebuah keanehan, kejanggalan, sekaligus sebagai sebuah keunikan, saat ada sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk MTs, tapi kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang diselenggarakan adalah dalam bentuk SMA atau SMK; ataupun sebaliknya, yaitu dimulai menyelenggarakan SMP, kemudian dilanjutkan dalam bentuk MA atau MAK. Di antara penyelenggara pendidikan tersebut adalah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Imam Syuhodo di Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo pada awalnya dimulai dengan pendirian pendidikan formal dalam bentuk MTs pada tahun 1985, kemudian SMA pada tahun 1998. Sementara Pondok-Pondok di sekitarnya menyelenggarakan lembaga pendidikan yang linier, seperti

Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta yang menyelenggarakan SMP dan SMA, di samping MA (<http://almuayyad.org>, diakses pada 3 Januari 2017); Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo yang menyelenggarakan MTs dan MA, di samping SMA dan SMK (<http://assalaam.or.id>, diakses pada 3 Januari 2017); Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Sukoharjo yang menyelenggarakan MTs dan MA, di samping KMI (Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah) (<http://almukmin.com>, diakses pada 3 Januari 2017); dan Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yang menyelenggarakan SMP dan SMA (<http://darulhsan.sch.id>, diakses pada 3 Januari 2017). Linieritas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing Pondok Pesantren tersebut tentu memiliki misi dan tujuan tertentu, antara lain adalah untuk keberlanjutan program yang dikembangkan, baik yang mengembangkan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.

Tidak linier-nya pendidikan formal yang dikembangkan di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo menjadi menarik untuk diteliti; mengapa Pondok Pesantren tersebut memilih menyelenggarakan SMA setelah MTs? Mengapa tidak menyelenggarakan MA atau MAK?

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini adalah “mengapa Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk MTs dan SMA?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi terhadap alasan pemilihan penyelenggaraan bentuk satuan pendidikan MTs sementara pada jenjang pendidikan di atasnya dalam bentuk SMA yang ada di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo. Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi dua hal (1) Bagi pengembang lembaga pendidikan: bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih dan menentukan bentuk satuan pendidikan yang akan diselenggarakan, terutama di lingkungan Pondok Pesantren; dan (2) Bagi pengambil kebijakan: bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pada masa-masa mendatang, baik oleh Kementerian Agama maupun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Telah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo di Sukoharjo, di antaranya dilakukan oleh Lila Fauziah (2010), Nur Rohmah Prihatanti (2010), dan Rohmat Suprpto (2014).

Lila Fauziah (<http://eprint.ums.ac.id>, diakses pada 4 Januari 2017) meneliti tentang peran Pondok Pesantren Modern “Imam Syuhodo”

dalam pembinaan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Nur Rohmah Prihatanti (<http://digilib.uns.ac.id>, diakses pada 5 Januari 2017) meneliti tentang hubungan antara tingkat kecemasan dengan kejadian dismenorea pada remaja putri di Pondok Pesantren Imam Syuhodo Polokarto Sukoharjo. Sedangkan Rohmat Suprpto (2014) meneliti tentang deradikalisasi agama melalui pendidikan multikultural-inklusivisme di Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo. Ketiga penelitian tersebut tidak ada yang mengungkap tentang alasan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Imam Syuhodo menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk MTs dan SMA. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilakukan.

Secara teoritik, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3). Adapun pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui tiga jalur yang

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 13). Sedangkan jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 14).

Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (PP RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab II Pasal 49). Ada perbedaan antara madrasah dan sekolah. Kaum simbolis membedakan antara lain dalam tiga hal (Muhaimin, 2011: 116-118). **Pertama**, bahwa di madrasah, mata pelajaran agama Islam dibagi ke dalam beberapa sub-mata pelajaran, yaitu al-Qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahkan ditambah dengan mata pelajaran Bahasa Arab sejak MI hingga MA, sehingga porsi mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih banyak. Sementara pada pendidikan sekolah, mata pelajaran pendidikan agama Islam digabung menjadi satu, dan porsinya hanya tiga sampai empat jam per-pekan; namun demikian, di dalamnya pada dasarnya juga meliputi al-Qur'an-

Hadits, keimanan (aqidah), akhlak, ibadah-syariah-muamalah (fikih), dan sejarah kebudayaan Islam.

**Kedua**, di madrasah, para peserta didiknya (khususnya) memakai jilbab dan peserta didik putra memakai celana panjang; sedangkan di sekolah, para peserta didik putri memakai baju rok selutut, bahkan ada yang di atas lutut dan peserta didik putra memakai celana pendek untuk jenjang pendidikan dasar, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah peserta didik laki-laki memakai celana panjang dan peserta didik putri boleh memakai baju rok selutut dan boleh juga memakai jilbab.

**Ketiga**, bila peserta didik berjumpa dengan peserta didik lain atau berjumpa dengan guru, kepala madrasah atau tenaga kependidikan lainnya; maka untuk di madrasah, mereka akan saling mengucapkan (*assalamu'alaikum*). Sedangkan di sekolah bisa bermacam-macam, ada selamat pagi, selamat siang dan selamat sore, dan ada pula yang saling mengucapkan salam. Di madrasah, kegiatan belajar-mengajar didahului dengan ucapan salam dari sang guru atau mungkin ditambah dengan do'a berbahasa Arab, demikian juga pada akhir kegiatan belajar-mengajar. Sedangkan di sekolah, tidaklah sama antara suatu sekolah dengan sekolah lainnya karena gurunya yang bervariasi.

Makna substantif madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam dapat dilihat

dari beberapa perspektif, yaitu perspektif historis, filosofis, dan sosiologis (Muhaimin, 2011: 118-128). **Perspektif historis**, lahirnya madrasah berawal dari pesantren atau merupakan pengembangan dari pesantren. Oleh karena itu, nilai-nilai pesantren harus selalu melekat pada madrasah. Di antara ciri-ciri pondok pesantren yaitu adanya kiai dan santri, pengajian kitab, masjid, dan pondok. Oleh karena itu, sebagai implikasinya, madrasah perlu dikembangkan sebagaimana berikut: (1) Kepala madrasah dan guru/pendidik perlu memosisikan dirinya sebagai *kyai/nyai* dan *ustadz/ustadzah*, sedangkan peserta didik di madrasah diposisikan sebagai santri; (2) Di pesantren terdapat pengajian kitab. Oleh karena itu, madrasah perlu dikembangkan sebagai wahana untuk mendekatkan peserta didik/santri kepada kitab sucinya, untuk mempelajari dan mendalami ajaran dan nilai-nilai agama Islam, serta sebagai wahana pembinaan ruh dan praktek hidup keagamaan Islam; dan (3) Di pesantren terdapat masjid dan pondok. Oleh karena itu, madrasah harus berusaha untuk mengembangkan aktivitas pendidikannya agar para peserta didik memiliki kedekatan dan kecintaan terhadap tempat ibadah. Sedangkan pondok merupakan symbol untuk mengekspresikan dan menciptakan konteks atau suasana kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islami.

**Perspektif filosofis**; madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan Islam, yakni suatu institusi pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sebagai institusi pendidikan Islam, madrasah melaksanakan kegiatan pendidikan Islam, yaitu “upaya normatif untuk membantu seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) dalam mengembangkan pandangan hidup Islami (bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam), sikap hidup Islami, yang dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari”.

**Perspektif sosiologis**; bahwa madrasah merupakan institusi sosial. Jika dilihat dari struktur hubungan antar manusianya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hubungan, yaitu (1) hubungan atasan-bawahan; (2) hubungan profesional; dan (3) hubungan sederajat atau sukarela. *Hubungan atasan-bawahan* mengandaikan perlunya kepatuhan dan loyalitas para guru terhadap atasannya, seperti terhadap pimpinan madrasah, peserta didik terhadap guru dan pimpinannya, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan aturan yang berlaku. *Hubungan profesional* mengandaikan perlunya penciptaan hubungan

yang rasional, kritis dinamis antar sesama guru atau antara guru dan pimpinannya dan atau peserta didik dengan guru dan pimpinannya untuk saling berdiskusi, asah dan asuh, tukar menukar informasi, saling berkeinginan untuk maju serta meningkatkan kualitas madrasah, profesionalitas guru dan kualitas layanan terhadap peserta didik. *Hubungan sederajat atau sukarela* merupakan hubungan manusiawi antar teman sejawat, untuk saling membantu, mengingatkan, dan melengkapi antara satu dengan lainnya. Untuk menghindari tumpang tindih dalam penerapan ketiga hubungan tersebut, maka hubungan atasan-bawahan, profesional, dan hubungan sederajat tersebut perlu dikembangkan di madrasah secara cermat dan proporsional dengan dilandasi oleh kode etik tertentu yang dibangun dari ajaran dan nilai-nilai agama.

Adapun sekolah dikatakan sebagai lembaga yang strategis dalam menyiapkan generasi muda bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Peranan pendidikan agama di sekolah adalah sangat strategis dalam membangun peserta didik yang beretika dan bermoral yang dilandasi dengan keyakinan religius yang kokoh. Sebagaimana dikemukakan dalam Liberty University Online, bahwa peranan sekolah antara lain adalah untuk (1) *socialization*; (2) *cultural innovation*; (3) *social change*; (4) *social integration*; (5) *social placement*;

(6) *perpetuating inequality*; (7) *school tracking*; (8) *qualification certification*; and (9) *other latent function*. Di samping itu, pendidikan persekolahan juga memiliki peran strategis bagi pembentukan moralitas dan akhlak bangsa dalam rangka membangun bangsa yang berkarakter, yaitu bangsa yang cerdas, jujur, bertanggungjawab dan rela berbagi dalam kebaikan (Tobroni, 2012: 209-2011).

Dalam realitas, banyak pesantren yang menyelenggarakan sistem sekolah (Muhaimin, 2009: 103-104). Di dalam pesantren yang menyelenggarakan sistem sekolah, tradisi-tradisi pesantren telah berkembang terlebih dahulu, sehingga terkesan seolah-olah fungsi pendidikan lebih bersifat upaya menjaga, mewariskan dan melestarikan tradisi-tradisi yang berlaku. Begitu kentalnya tradisi tersebut sehingga pada sebagian pesantren kadangkala sulit menerima perubahan-perubahan atau budaya baru dari luar.

Adapun persyaratan pendirian satuan pendidikan SMA meliputi: (1) Hasil studi kelayakan; (2) Isi pendidikan; (3) Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Sarana dan prasarana pendidikan; (5) Pembiayaan pendidikan; (6) Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan (7) Manajemen dan proses pendidikan (Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah Bab II Pasal 4). Selain persyaratan tersebut, pendirian satuan pendidikan juga harus melampirkan: (1) Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; (2) Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; (3) Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; (4) Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; (5) Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; (6) Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan (7) Data mengenai status kepemilikan tanah dan atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara (Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Bab II Pasal 4).

Dalam Keputusan Dirjen Pendis No. 1385 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Bab II antara lain dikemukakan bahwa persyaratan administratif pendirian madrasah adalah (1) Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum; (2) Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus; (3) Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama; dan (4) Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pejalaran berikutnya. Sedangkan persyaratan teknisnya meliputi: (1) Dokumen kurikulum; (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Madrasah; (3) Jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan (4) Sarana dan prasarana. Di samping itu, juga dikemukakan tentang persyaratan kelayakan yang dilihat dari sisi tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya masyarakat sekitar; dan (5) Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan atau penelitian kancah), karena penelitian ini dilakukan di lapangan, yaitu di sebuah lembaga pendidikan (Arikunto, 2006: 10); bukan penelitian



pustaka. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Cabang Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan data-data tidak dalam bentuk angka dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya (Arikunto, 2006: 12). Sedangkan strategi yang digunakan adalah studi kasus, yaitu merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Stake dalam Creswell, 2016: 20). Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya wawancara, bahan audio visual, dokumen, dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2015: 135-136). Dalam penelitian ini, penyelidikan dilakukan terhadap program pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan

dokumentasi. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan responden, mewawancari mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan (responden) (Creswell, 2016: 267). Wawancara ini dilakukan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo untuk menggali data alasan dipilihnya MTs dan SMA sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan, juga data pendukung lainnya.

Metode dokumentasi kualitatif dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen, bisa berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, surat, e-mail) (Creswell, 2016: 267-270). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah pendirian dan perkembangan Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo dan data pendukung lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, langkah-langkah analisis data tersebut adalah (1) mempersiapkan dan mengorganisasikan data; (2) mengeksplorasi dan mengode basis-data; (3) mendeskripsikan temuan dan membetuk tema; (4) Merepresentasikan dan melaporkan temuan; (5) Menginterpretasikan

makna temuan; dan (6) Menvalidasi keakuratan temuan (Creswell, 2015: 467).

## **TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 154 Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo Jawa Tengah, nama lengkapnya adalah Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Sukoharjo, dan lazim disingkat dengan PPMIS (Dokumen dari Tim LP3M PWM Jateng dan Profil Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo, dikutip pada 5 Januari 2017). Pondok ini berdiri pada tahun 1995, yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo dengan semangat mencetak kader Persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan kader Islam pada umumnya dengan harapan mampu turut berperan dalam mencerdaskan bangsa melalui amal usaha pendidikan dengan sistem pesantren (Dokumen Porfil Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo, dikutip pada 5 Januari 2017).

Gagasan pendirian Pondok Pesantren ini diawali oleh adanya pemberian wakaf tanah seluas 10.308 M2 dari Koperasi Batik Sukowati Bekonang pada sekitar tahun 1970. Bapak Adnan, Bapak Muh. Busroni dan Bapak Marwah Mukti selaku

Ketua Koperasi Batik Sukowati dan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing, dalam amanahnya berpesan bahwa tanah wakaf dan bangunannya itu harus menjadi pesantren (Dokumen Profil Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo, dikutip pada 5 Januari 2017).

Pada tahun 1970, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing memulai pembangunan beberapa gedung; dan pada tahun 1975, beberapa gedung telah selesai terbangun. Namun demikian, keinginan untuk membuka program pesantren belum bisa terwujud karena kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu dan mau ikut mengelola pesantren, karena waktu itu baru memiliki Sembilan SDM jebolan (keluaran) dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo (Wawancara dengan Wakil Direktur PPMIS Sukoharjo/Bapak Sahadi Mulyo Hartono, pada 7 Januari 2017). Oleh karena itu, sambil menunggu personil yang siap untuk membina pesantren, maka gedung yang telah terbangun sementara digunakan untuk sekolah diniyah sore.

Seiring berjalannya waktu, bangunan yang hanya digunakan untuk sekolah diniyah sore, kemudian disepakati untuk didirikan Madrasah Tsanawiyah. Oleh karena itu, pada tahun 1985, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah didirikan. Madrasah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal

berdirinya Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo (Dokumen Porfil Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo, dikutip pada 5 Januari 2017).

Pada tahun 1994, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing dalam rapat pengurus bertekad untuk merealisasikan cita-cita para tokoh terdahulu, yaitu mendirikan pondok pesantren. Dalam perjalanannya, maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing membentuk kepanitiaan pendirian pondok pesantren, yang kemudian lahirlah Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo. Nama "Imam Syuhodo" diambil dari nama salah seorang tokoh Islam yang dikenal dengan sebutan "Kyai Apil Qur'an" (nama yang diberikan oleh Paku Buwono ke-4, karena Kyai Imam Syuhodo adalah hafal Al-Qur'an dan mendalami Al-Qur'an, bahkan Paku Buwono pernah berguru kepada Beliau). Ada harapan dengan nama "Imam Syuhodo" akan menghasilkan santri yang mau dan mampu ber-*tafaqquh fiddin* dan mendakwahkan Islam sebagaimana dilakukan oleh Kyai Imam Syuhodo (Dokumen Porfil Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo, dikutip pada 5 Januari 2017). Dengan demikian, mulai tahun 1995, siswa MTs ada yang sekaligus sebagai santri Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo; dan ada sebagian yang lain belajar selayaknya siswa pada umumnya, datang ke MTs untuk

belajar dan selepas jam belajar usai langsung kembali ke rumah masing-masing pada setiap harinya.

Dalam rentang waktu 13-an tahun, saat MTs dengan pengembangan pesantren berjalan makin mantap dan semakin diminati oleh masyarakat, maka untuk menyongsong tahun pelajaran 1998/1999 tergelitik untuk mengembangkan pesantren dengan mendirikan satuan pendidikan untuk tingkat menengah. Untuk kepentingan tersebut, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing beserta pengelola MTs dan Pondok Pesantren mengumpulkan para wali murid beserta para siswa untuk dimintai pendapat dan pandangannya. Ada dua alternatif satuan pendidikan yang ditawarkan, yaitu MA dan SMA. Dari 24 siswa MTs Muhammadiyah yang didampingi oleh para wali, ada 22 yang memilih SMA, satu memilih MA, dan yang satu "abstain" (Wawancara dengan Wakil Direktur PPMIS Sukoharjo, pada 7 Januari 2017).

Disamping mempertimbangkan pendapat dan pandangan para wali murid juga keinginan dan harapan para santri di atas, pengelola PPMIS juga mempunyai beberapa pertimbangan bahwa berdasarkan pengalaman mengelola unit MTs, permasalahan administrasi dirasakan terlalu rumit dan sering menyulitkan, di antaranya kalau saat ini adalah adanya EMIS. Pengelola PPMIS memandang bahwa dengan mengembangkan SMA yang

secara otomatis adalah menjadi binaan Kemendikbud, namun dirasakan bahwa ada kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum; di antaranya dalam hal pengembangan Imtaq (Imam dan taqwa) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai ciri dari SMA berbasis pesantren lebih memungkinkan dan selama ini merasa tidak pernah ada halangan. Misalnya, saat visitasi akreditasi, para asesor ditunjukkan kurikulum SMA yang dalam beberapa Mata Pelajaran disajikan dalam bahasa Arab tidak pernah dipermasalahkan, di samping adanya beberapa Mata Pelajaran sebagai pengembangan dari Pendidikan Agama Islam. Selama yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Kemendikbud tidak mempermasalahkan. Di sisi yang lain, kalau saat ini yang dirasakan sebagai kelebihan dari unit SMA adalah cukup mudahnya untuk memperoleh bantuan, sehingga bisa mensejahterakan lembaga (Wawancara dengan Wakil Direktur PPMIS Sukoharjo, pada 7 Januari 2017).

Sementara itu, unit MTs PPMIS yang berada di bawah binaan Kemenag, ada beberapa problem yang ditemukan dan dirasakan, di antaranya adalah (1) Dalam bidang kesejahteraan, kurang menjanjikan, bahkan MTs PPMIS sering “dijagakke” (diharapkan), karena sudah menjadi lembaga pendidikan

yang relatif besar, maka sering dibebani untuk menerima tamu-tamu dari Pusat; (2) Dalam bidang kurikulum, kurang ada keleluasaan untuk melakukan pengembangan, karena ketika pada mulanya mengembangkan kurikulum keagamaan untuk kelas VII dan VIII berbasis ciri khusus pesantren Muhammadiyah kemudian saat ada monitoring dari Kemenag, memperoleh teguran yang kemudian diminta untuk menggunakan kurikulum Kemenag, yang akhirnya upaya untuk menjaga idiologi Muhammadiyah melalui intra-kurikuler tidak bisa terakomodasi secara optimal; dan (3) Dalam bidang administrasi, sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa administrasi relatif lebih sulit dan menyulitkan dibandingkan dengan yang ada di bawah Kemendikbud, di antaranya adalah adanya EMIS (untuk saat ini) (Wawancara dengan Wakil Direktur PPMIS Sukoharjo/Bapak Sahadi Mulyo Hartono, pada 7 Januari 2017).

Oleh karena itu, setelah dipertimbangkan secara matang, maka didirikanlah SMA Muhammadiyah. Pada tahun pertama (1998), siswa/santri yang mendaftar SMA ada 14 siswa. Empat anak berasal dari lulusan MTs PPMIS Sukoharjo sendiri, sedangkan 10 siswa/santri lainnya adalah pendatang baru. Namun demikian, perkembangan SMA PPMIS cukup prospektif. Hal itu itu

bisa dibuktikan bahwa pada tahun pelajaran 2016/2017 bisa menerima tiga kelas.

Visi Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo adalah “Terwujudnya alumni santri yang memiliki keimanan yang benar, intelektual dan moral yang tinggi, yang mempunyai semangat juang untuk selalu beramar ma`ruf nahi munkar sehingga terciptanya masyarakat yang diridhoi Allah SWT”. Sedangkan misinya adalah (1) Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pemahaman dan pendalaman agama Islam secara benar; (2) Meningkatkan kinerja Pondok Pesantren Modern yang berbasis pada profesionalitas yang berakhlak karimah untuk menghasilkan suasana kehidupan Pondok Pesantren yang kondusif dan berkemajuan; dan (3) Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berbasis pesantren yang berwawasan iman dan pengetahuan (Dokumen Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo, dikutip pada 6 Januari 2017).

Ada dua satuan pendidikan yang dikembangkan, yaitu MTs, dan SMA. Masing-masing satuan pendidikan memiliki visi, misi dan tujuan yang berbeda. Visi MTs Muhammadiyah Blimbing adalah “Membentuk manusia yang berakhlak karimah, cerdas, terampil, dan mandiri”, dengan misi

(1) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang cerdas dan islami; dan (2) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memberikan perubahan pada peserta didik menjadi terampil dan mandiri. Sedangkan tujuan MTs ini adalah (1) Mewujudkan peserta didik yang agamis, cerdas, dan berkompotensi; dan (2) Mewujudkan peserta didik yang memiliki kemandirian dalam masyarakat (Dokumen Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo, dikutip pada 6 Januari 2017).

Pada jenjang pendidikan menengah yang mengembangkan SMA, memiliki visi, yaitu “terwujudnya kader bangsa dan persyarikatan yang berwawasan masa depan, berakhlak karimah, unggul dalam Imtaq dan Iptek”, dengan misi (1) Memanfaatkan seluruh sumber daya sekolah untuk membentuk kepribadian muslim yang sesuai dengan ajaran Islam; (2) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada *live skill*; (3) Mengembangkan kecerdasan intelegensi, sosial, emosional dan spiritual; (4) Membina karakter dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; (5) Mengembangkan SDM profesional dan kompetitif yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta berwawasan lingkungan; dan (6) Mempersiapkan kader bangsa dan persyarikatan yang tangguh. Sedangkan tujuannya dipilahkan ke dalam dua hal, yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; dan tujuan khususnya adalah (1) Terwujudnya perilaku peserta didik yang berkepribadian islami; (2) Terwujudnya prestasi lulusan yang siap mengikuti pendidikan lebih lanjut dan berdaya saing; (3) Terwujudnya lulusan yang mampu berperan aktif dalam masyarakat; (4) Terwujudnya jaringan kerja yang harmonis dengan orang tua, masyarakat dan pemerintah; dan (5) Terwujudnya peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, objektivitas dan tanggung jawab (Dokumen Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo, dikutip pada 6 Januari 2017).

Upaya dan kegigihan yang dilakukan oleh para pengelola, mulai dari unsur pimpinan, ustadz/ustadzah, sampai segenap tenaga kependidikan akhirnya membuahkan hasil sebagaimana tujuan umum SMA di atas, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan lanjut yang ditempuh para alumni SMA PPMIS menyebar baik di Perguruan Tinggi (PT) dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri, antara lain di Universitas Kairo

Mesir, Yordania, Sudan, dan Yaman; sedangkan di dalam negeri, baik di PT Negeri maupun PT Swasta, antara lain Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Surakarta (UNS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta (Dokumen Profil Pondok, dikutip pada 5 Januari 2017).

Berdasarkan pada paparan data dan hasil pembahasan di atas, maka dapat diungkapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo yang mengembangkan dua unit satuan pendidikan yaitu dari MTs ke SMA karena dipengaruhi dan ditopang oleh beberapa hal:

Modal utama: adanya wakaf tanah untuk pendirian pesantren dari Koperasi Batik Sukowati yang cukup luas, keinginan dan kegigihan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing untuk menyiapkan kader-kader umat dan bangsa.

Lingkungan sosial: adanya harapan dan dukungan masyarakat untuk mendirikan SMA, bukan MA setelah anak-anak warga masyarakat sekitar belajar di MTs.

Hal itu ditunjukkan saat *pooling* tentang pilihan melanjutkan belajar setelah dari MTs, saat dilakukannya pertemuan untuk meminta pendapat dan pandangan dari para wali siswa MTs PPMIS.

**Historis:** adanya beberapa pengalaman kurang menyenangkan dalam mengembangkan unit MTs yang berada di bawah binaan Kemenag, baik menyangkut urusan administrasi yang rumit dan sering dirasakan menyulitkan, kurikulum yang tidak bisa berkembang dengan secara bebas dan leluasa serta tidak mudahnya mengakomodir kepentingan pengembangan kurikulum berbasis pesantren Muhammadiyah, maupun minimnya kesejahteraan, termasuk minimnya bantuan dari Kemenag.

**Kebijakan Pemerintah:** adanya perbedaan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan antara untuk lembaga-lembaga di bawah binaan Kemenag dan Kemendikbud. Di bawah Kemenag sering lamban namun sering lebih rumit dan menyulitkan dibandingkan dengan kebijakan di bawah Kemendikbud.

**Yayasan:** Persyarikatan Muhammadiyah sebagai yayasan MTs dan SMA berbasis pesantren memang memiliki konsern dalam bidang pendidikan, yang bertujuan untuk turut berpartisipasi mencerdaskan umat dan bangsa, sekaligus untuk mempersiapkan kader dalam rangka menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah melalui organisasi dan

gerakan praksis yang berkemajuan yang antara lain diwujudkan dalam berbagai Amal Usaha Muhammadiyah. Oleh karena itu, dengan basic ilmu keagamaan di MTs dikembangkan dengan penguatan Ilmu Pengetahuan di SMA yang lebih menjanjikan dengan tetap ada penguatan dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyah diharapkan bisa menghantarkan para alumninya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ke depannya bisa mengisi ruang-ruang yang dibutuhkan oleh umat dan Persyarikatan Muhammadiyah.

Dengan diselenggarakannya lembaga pendidikan, dari MTs ke SMA, maka PPMIS telah memfasilitasi terwujudnya tujuan masing-masing satuan pendidikan, dan dengan dipilihnya SMA pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah menghasilkan lulusan yang menyebar di berbagai Perguruan Tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik negeri maupun swasta.

## SIMPULAN

Berpijak pada paparan temuan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan simpulan bahwa alasan pemilihan penyelenggaraan bentuk satuan pendidikan MTs sementara pada jenjang pendidikan di atasnya dalam bentuk SMA yang ada di Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Bidang kurikulum; dengan satuan pendidikan SMA yang merupakan lembaga pendidikan di bawah binaan Kemendikbud, pengembangan kurikulum relatif lebih leluasa dan dirasakan ada kebebasan, termasuk mengembangkan kurikulum berbasis pesantren Muhammadiyah.
2. Bidang kesejahteraan; dengan satuan pendidikan SMA yang merupakan lembaga pendidikan di bawah binaan Kemendikbud dirasakan lebih sejahtera, karena lembaga cukup mudah memperoleh bantuan. Hal itu sangat terasa ketika dibandingkan dengan MTs yang berada di bawah binaan Kemenag.
3. Bidang administrasi; dengan satuan pendidikan SMA yang merupakan lembaga pendidikan di bawah binaan Kemendikbud dirasakan urusan administrasi tidak seribet dan sesulit dalam bentuk MTs yang berada di bawah binaan Kemenag.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2015. *Riset Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2016. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Dirjen Pendis No. 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. 2011. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- PP RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Suprpto, Rohmat. 2014. "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Multikultural-Inklusiv (Studi pada Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo)", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember.
- Tim LP3M PWM Jateng. 2015. *Direktori Pondok Pesantren Muhammadiyah Se-Jawa Tengah*. tt: Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren



Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah  
Periode 2010-2015.

Tobroni. 2012. *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan (Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan)*. Bandung: Karya Putra Darwati.

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Sumber dari Internet:**

<http://almuayyad.org>, diakses pada 3 Januari 2017.

<http://almukmin.com>, diakses pada 3 Januari 2017.

<http://assalaam.or.id>, diakses pada 3 Januari 2017.

<http://darulihisan.sch.id>, diakses pada 3 Januari 2017.

<http://digilib.uns.ac.id>, diakses pada 5 Januari 2017.

<http://endangermanto.com>, diakses pada 3 Januari 2017.

<http://eprint.ums.ac.id>, diakses pada 4 Januari 2017.